



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

# SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JALAN KECUBUNG I NO. 4 TELP. (0361) 228713 DENPASAR

---

## Laporan Triwulan IV Pengelolaan Risiko

Pemerintah Daerah

Kota Denpasar

### BAB I

#### Pendahuluan

##### A. Latar Belakang

Penilaian risiko dilaksanakan untuk meningkatkan Kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Daerah kreatif berwawasan budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan sesuai visi pembangunan daerah yaitu Denpasar kota berbudaya dilandasi Tri Hita Karana; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, sehingga diperlukan pengaturan untuk memberikan arah dan kepastian hukum dalam mengelola risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;.

##### B. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

### **C. Maksud dan Tujuan**

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Unit Kepatuhan untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

### **D. Ruang Lingkup**

Kegiatan pemantauan efektivitas manajemen risiko di lingkungan UPR Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024.

## BAB II

### Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

#### A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan IV

##### 1. Identifikasi Risiko

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 8 risiko (populasi risiko), dengan rincian sebagaimana terdapat pada **Lampiran 1. (form 4)** terdiri dari 2 risiko strategis dan 6 risiko operasional

##### 2. Analisis risiko dan Evaluasi Risiko

Dari 8 jumlah risiko (**jumlah di form 4**) risiko yang teridentifikasi (seluruhnya merupakan bagian dari usulan risiko kepada Unit Manajemen Risiko), telah dianalisis dengan hasil sebagai berikut:

- a. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 0 (nol) risiko (0.% dari 8 risiko), yang merupakan risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada **Lampiran 2 (form 5)**.
- b. Seluruh prioritas telah memiliki existing control (sebanyak 8 (delapan) risiko atau 100 % dari jumlah/populasi risiko prioritas). (**Form 7**)
- c. Sebanyak 8 (delapan) risiko prioritas telah memiliki existing control namun belum memadai sebanyak 0 risiko atau 0% dari jumlah/populasi risiko prioritas. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada **Lampiran 3 (form 7)**.

#### B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan IV

1. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan pada Triwulan IV sebanyak 1 (SATU) kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada **Lampiran 4. (form 8)** atas perencanaan TW I pelaporan.
2. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi pada Triwulan IV sebanyak 6 (enam) atau 50 % dari 8. kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada **Lampiran 5 (form 9)**.
3. Tidak terdapat kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sebelum rencana yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

### **BAB III**

#### **Hambatan Pelaksanaan Kegiatan**

Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian antara lain :

- a. belum optimalnya penegakan perda /perwali di Kota Denpasar karena belum adanya sistem terintegrasi dengan SKPD terkait yang dapat mempercepat efektivitas dan efisiensi penegakan perda
- b. Kurangnya pemahanan personil terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan.
- c. sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP Kota Denpasar masih belum memadai

### **BAB IV**

#### **Monitoring Risiko dan RTP**

Tidak terdapat kejadian risiko yang muncul pada Triwulan IV.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Pengelolaan risiko Satpol PP Kota Denpasar tahun 2024 ini memuat hasil identifikasi resiko kegiatan, dampak resiko, analisis resiko, serta status resiko yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilaksanakan. Laporan yang disusun dan dilaksanakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Satpol PP Kota Denpasar berdasarkan Renstra 2021-2026.

#### **B. SARAN**

Agar hasil dari monitoring pengelolaan risiko dapat ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan dalam proses perjalanan kegiatan. serta segera menyamakan persepsi terkait risiko-risiko kegiatan yang akan ada kedepannya.

Denpasar, 7 Januari 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Denpasar



Anak Agung Nugrah Bawa Nendra, SH., M.Si  
NIP. 6670418 199703 1 002



**Formulir Kertas Kerja  
Hasil Analisis Risiko**

| Nama Pemda          | : PEMERINTAH KOTA DENPASAR  |                 |                 |                      |              |
|---------------------|---|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|
| Tahun Penilaian     | : 2024  |                 |                 |                      |              |
| Tujuan Strategis    | : meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meningkat Di Kota Denpasar  |                 |                 |                      |              |
| Urusan Pemerintahan | :URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT  |                 |                 |                      |              |
| No.                 | "Risiko" yang Teridentifikasi   | Kode Risiko     | Analisis Risiko |                      |              |
|                     |   |                 | Skala Dampak*)  | Skala Kemungkinan *) | Skala Risiko |
| <i>a</i>            | <i>b</i>  | <i>c</i>        | <i>d</i>        | <i>e</i>             | <i>f=dxe</i> |
| <b>I</b>            | <b>Risiko Strategis Pemda</b>   |                 |                 |                      | 0            |
| 1                   | Belum Optimalnya Peningkatan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perwali;  | RSP.24.05.10.01 | 2               | 2                    | 4            |
| <b>II</b>           | <b>Risiko Strategis OPD</b>   |                 |                 |                      |              |
|                     | <b>Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja</b>  |                 |                 |                      |              |
| 1                   | Masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Denpasar.  | RSO.24.05.10.01 | 2               | 2                    | 4            |
| 2                   | belum optimalnya penegakan perda /perwali di Kota Denpasar karena belum adanya sistem terintegrasi dengan SKPD terkait yang dapat mempercepat efektivitas dan efisiensi penegakan perda | RSO.24.05.10.02 | 2               | 2                    | 4            |

| <i>a</i>   | <i>b</i>   | <i>c</i>        | <i>d</i> | <i>e</i> | <i>f=dxe</i> |
|------------|--|-----------------|----------|----------|--------------|
| <b>III</b> | <b>Risiko Operasional OPD</b>  |                 |          |          |              |
|            | <b>Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja</b>   |                 |          |          |              |
| 1          | Persentase Penyelesaian pelanggaran Perda dan Perwali yang ditertibkan tidak sesuai target       | ROO.24.05.10.01 | 2        | 2        | 4            |
| 2          | Persentase Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditertibkan tidak sesuai target | ROO.24.05.10.02 | 2        | 2        | 4            |
| 3          | terkendalanya pembayaran gaji dan tunjangan ASN  | ROO.24.05.10.03 | 2        | 2        | 4            |
| 4          | terkendalanya Pemenuhan kebutuhan Peralatan Kantor, Bahan Bacaan dan Instalasi penerangan Kantor | ROO.24.05.10.04 | 2        | 2        | 4            |
| 5          | terkendalanya pembayaran honor pegawai kontrak   | ROO.24.05.10.05 | 2        | 2        | 4            |
| 6          | terkendalanya pemeliharaan kendaraan operasional kantor dan pemeliharaan gedung kantor           | ROO.24.05.10.06 | 2        | 2        | 4            |
| 7          | Terkendalanya Pengadaan barang milik daerah  | ROO.24.05.10.07 | 2        | 2        | 4            |
| 8          | Terkendalanya pengadaan pakaian dinas  | ROO.24.05.10.08 | 2        | 2        | 4            |

**Formulir Kertas Kerja  
Daftar Risiko Prioritas**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Nama Pemda          | : PEMERINTAH KOTA DENPASAR  |
| Tahun Penilaian     | : 2024  |
| Tujuan Strategis    | : meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat Di Kota Denpasar |
| Urusan Pemerintahan | :URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                    |

| No        | Risiko Prioritas  | Kode Risiko     | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab   | Dampak  |
|-----------|---|-----------------|--------------|----------------|--|---|
| <i>a</i>  | <i>b</i>  | <i>c</i>        | <i>d</i>     | <i>e</i>       | <i>f</i>   | <i>g</i>  |
| <b>I</b>  | <b>Risiko Strategis Pemda</b>   |                 |              |                |  |   |
|           | Belum Optimalnya Peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perwali; | RSP.24.05.10.01 | 2            | Kepala OPD     | perilaku tidak kooperatif dari pelanggar perda saat ditertibkan, dan kurangnya wawasan personil / aparat dalam proses penegakkan perda | adanya pelanggaran perda/perwali yang masih belum tertangani  |
| <b>II</b> | <b>Risiko Strategis OPD</b>   |                 |              |                |  |   |
|           | <b>Nama OPD : Satpol PP</b>   |                 |              |                |  |   |
| 1         | Masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Denpasar.  | RSO.23.05.10.01 | 2            | Kepala OPD     | Belum Optimalnya Peningkatan peranan Satpol PP Kota Denpasar dalam deteksi dan cegah dini terhadap                                     | Masih terdapatnya pelanggaran perda dan gangguan tramtibum yang terjadi di Kota Denpasar yang tidak terdeteksi sejak awal |

|            |   |                 |   |               |  |   |
|------------|---|-----------------|---|---------------|--|---|
|            |   |                 |   |               | pelanggaran perda dan perwali  |   |
|            |   |                 |   |               |  |   |
| 2          | belum optimalnya penegakan perda /perwali di Kota Denpasar karena belum adanya sistem terintegrasi dengan SKPD terkait yang dapat mempercepat efektivitas dan efisiensi penegakan perda | RSO.23.05.10.02 | 2 | Kepala OPD    | Kurang Koordinasi dengan Instansi terkait dalam penegakan perda                                | Terdapat pelanggaran perda/perwali yang masih belum tertangani secara optimal |
| <b>III</b> | <b>Risiko Operasional OPD</b>   |                 |   |               |  |   |
|            | <b>Nama OPD: Satpol PP</b>  |                 |   |               |  |   |
| 1          | Persentase Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditertibkan tidak sesuai target  | ROO.24.05.10.01 | 2 | Kepala Bidang | Masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi Perda dan Perwali di Kota Denpasar . | Terdapat pelanggaran perda/perwali yang masih belum tertangani secara optimal |
| 2          | Persentase Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditertibkan tidak sesuai target  | ROO.24.05.10.02 | 2 | Kepala Bidang | pelanggar tramtibum tidak bersikap kooperatif saat ditertibkan                                 | Tidak tercapainya target penyelesaian pelanggaran tramtibum di Kota Denpasar  |
| 3          | terkendalanya pembayaran gaji dan tunjangan ASN   | ROO.24.05.10.03 | 2 | Sekretaris    | Sistem / jaringan error pada saat pembuatan / pengajuan gaji                                   | terlambatnya pembayran gaji dan tunjangan ASN                                 |

|   |  |                 |   |            |  |  |
|---|--|-----------------|---|------------|--|--|
| 4 | terkendalanya Pemenuhan kebutuhan Peralatan Kantor, Bahan Bacaan dan Instalasi penerangan Kantor | ROO.24.05.10.04 | 2 | Sekretaris | harga barang yang tidak stabil serta keterlambatan penyedia dalam mengirim barang kebutuhan kantor | Operasional kantor terganggu   |
| 5 | terkendalanya pembayaran honor pegawai kontrak   | ROO.24.05.10.05 | 2 | Sekretaris | Sistem / jaringan error pada saat pembuatan / pengajuan honor pegawai kontrak                      | terlambatnya pembayran honor pegawai kontrak                                   |
| 6 | terkendalanya pemeliharaan kendaraan operasional kantor dan pemeliharaan gedung kantor           | ROO.24.05.10.06 | 2 | Sekretaris | penanggung jawab kendaraan / aset kantor tidak secara rutin mengecek sarana / prasarananya         | terganggunya kegiatan rutin satpol ppyang memerlukan sarana / prasarana kantor |
| 7 | Terkendalanya Pengadaan barang milik daerah  | ROO.24.05.10.07 | 2 | PPK        | kendala mencari produk ber TKDN  | terkendalanya upaya peremajaan sarana prasarana satpol PP                      |
| 8 | Terkendalanya pengadaan pakaian dinas  | ROO.24.05.10.08 | 2 | PPK        | kendala pengadaan tidak tepat waktu  | terlambatnya penyediaan pakaian dinas  |
|   |  |                 |   |            |  |  |

**Formulir Kertas Kerja  
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan**

| Nama Pemda : PEMERINTAH KOTA DENPASAR<br>Tahun Penilaian : 2024<br>Tujuan Strategis : meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meningkat Di Kota Denpasar<br>Urusan Pemerintahan :URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |  |             |                                       |  |                             |                           |                           |
|--|--|-------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| No   | Risiko Prioritas   | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian                       | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
| <i>a</i>   | <i>b</i>   | <i>c</i>    | <i>d</i>                              | <i>e</i>                                 | <i>f</i>                    | <i>g</i>                  | <i>h</i>                  |
| <b>I</b>   | <b>Risiko Strategis Pemda</b>  |             |                                       |  |                             |                           |                           |
|  | Belum Optimalnya Peningkatan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perwali; |             | SOP Penertiban Satpol PP              | Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan |                             |                           |                           |

|           |   |                 |                          |  |  |            |             |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|--|--|------------|-------------|
|           |   |                 |                          |  |  |            |             |
| <b>II</b> | <b>Risiko Strategis OPD</b>   |                 |                          |  |  |            |             |
|           | <b>Nama OPD:<br/>Satpol PP</b>  |                 |                          |  |  |            |             |
| 1         | Masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Denpasar.  | RSO.24.05.10.01 | SOP Penertiban Satpol PP | Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan | Meningkatkan pengetahuan Aparat mengenai Deteksi dan Cegah Dini dalam upaya penanganan pelanggaran perda | Kepala OPD | tw III 2024 |
| 2         | belum optimalnya penegakan perda /perwali di Kota Denpasar karena belum adanya sistem terintegrasi dengan SKPD terkait yang dapat mempercepat efektivitas dan efisiensi penegakan perda | RSO.24.05.10.02 | SOP Penertiban Satpol PP | Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan | Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dengan instansi terkait                                     | Kepala OPD | tw III 2024 |

|            |  |                     |                          |  |   |               |                  |
|------------|--|---------------------|--------------------------|--|---|---------------|------------------|
|            |  |                     |                          |  |   |               |                  |
| <b>III</b> | <b>Risiko Operasional</b>  |                     |                          |  |   |               |                  |
|            | <b>Nama OPD : Satpol PP</b>  |                     |                          |  |   |               |                  |
| 1          | Persentase Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditertibkan tidak sesuai target | ROO.24.05.10.0<br>1 | SOP Penertiban Satpol PP | Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan | Mengedepankan upaya persuasif dalam Penegakkan perda dan meningkatkan Kompetensi personil/aparat  | Kepala Bidang | 1 Tahun Anggaran |
| 2          | Persentase Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditertibkan tidak sesuai target | ROO.24.05.10.0<br>2 | SOP Penertiban Satpol PP | Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan | Melakukan pendataan lebih awal di wilayah yang banyak terdapat potensi gangguan tramtibum, serta lebih intensif melakukan penertiban secara berkala dengan membuat aplikasi pengaduan | Kepala Bidang | 1 Tahun Anggaran |
| 3          | terkendalanya pembayaran gaji dan tunjangan ASN  | ROO.24.05.10.0<br>3 | SOP Pembayaran Gaji      | Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan | melakukan pemeliharaan jaringan agar pembayaran gaji tetap lancar   | sekretaris    | 1 Tahun Anggaran |

|   |  |                     |                       |  |  |            |                  |
|---|--|---------------------|-----------------------|--|--|------------|------------------|
|   |  |                     |                       |  |  |            |                  |
| 4 | terkendalanya Pemenuhan kebutuhan Peralatan Kantor, Bahan Bacaan dan Instalasi penerangan Kantor | ROO.24.05.10.0<br>4 | SOP pengajuan SPJ     | Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan | berkoordinasi dengan penyedia terkait harga barang dan pengiriman barang | sekretaris | 1 Tahun Anggaran |
| 5 | terkendalanya pembayaran honor pegawai kontrak   | ROO.24.05.10.0<br>5 | SOP Pembayaran Gaji   | Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan | melakukan pemeliharaan jaringan agar pembayaran gaji tetap lancar        | sekretaris | 1 Tahun Anggaran |
| 6 | terkendalanya pemeliharaan kendaraan operasional kantor dan pemeliharaan gedung kantor           | ROO.24.05.10.0<br>6 | SOP Pemeliharaan aset | Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan | melakukan pengecekan rutin kondisi aset dan kendaraan                    | sekretaris | 1 Tahun Anggaran |
|   |  |                     |                       |  |  |            |                  |

|   |  |                 |  |  |  |            |                  |
|---|--|-----------------|--|--|--|------------|------------------|
| 7 | Terhambatnya proses pemilihan penyedia | ROO.24.05.10.06 | 1. Perwali No 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi<br>2. Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan | Pemanfaatan SIKAP LKPP dalam pemilihan penyedia barang/jasa dan Pengadaan barang/jasa melalui SPSE | sekretaris | 1 Tahun Anggaran |
| 8 | kendala mencari produk ber TKDN        | ROO.24.05.10.06 | 1. Perwali No 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi<br>2. Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan | Pemanfaatan SIKAP LKPP dalam pemilihan penyedia barang/jasa dan Pengadaan barang/jasa melalui SPSE | sekretaris | 1 Tahun Anggaran |
|   |  |                 |  |  |  |            |                  |

**RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN**

| Nama Pemda : PEMERINTAH KOTA DENPASAR<br>Tahun Penilaian : 2024<br>Tujuan Strategis : meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat Di Kota Denpasar<br>Urusan Pemerintahan :URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |   |  |                    |                               |                            |                              |            |
|---|---|--|--------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------|
| No  | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan   | Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian         | Penyedia Informasi | Penerima Informasi            | Rencana Waktu Pelaksanaaan | Realisasi Waktu Pelaksanaaan | Keterangan |
| <i>a</i>  | <i>b</i>  | <i>c</i>                                     | <i>d</i>           | <i>e</i>                      | <i>f</i>                   | <i>g</i>                     | <i>h</i>   |
| <b>I</b>  | <b>Risiko Strategis Pemda</b>   |  |                    |                               |                            |                              |            |
|   | Belum Optimalnya Peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perwali; | Sosialisasi Perda kepada aparat / masyarakat | Bagian Hukum       | Aparat Satpol PP / Masyarakat | TW IV 2024                 |                              |            |

|            |  |  |   |   |                  |  |  |
|------------|--|--|---|---|------------------|--|--|
|            |  |  |   |   |                  |  |  |
| <b>II</b>  | <b>Risiko Strategis OPD</b>  |  |   |   |                  |  |  |
|            | <b>Nama OPD: Satpol PP</b>   |  |   |   |                  |  |  |
| 1          | Meningkatkan pengetahuan Aparat mengenai Deteksi dan Cegah Dini dalam upaya penanganan pelanggaran perda | Sosialisasi Perda kepada aparat                  | Bagian Hukum  | Aparat Satpol PP  | TW IV 2024       |  |  |
| 2          | Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dengan instansi terkait                                     | Rapat / koordinasi                               | Bagian Hukum/<br>Kejaksaan<br>/<br>Pengadilan<br>/ TNI /<br>Polri / OPD<br>terkait<br>lainnya | Bagian Hukum/<br>Kejaksaan<br>/<br>Pengadilan<br>/ TNI /<br>Polri | TW III 2024      |  |  |
| <b>III</b> | <b>Risiko Operasional</b>  |  |   |   |                  |  |  |
|            | <b>Nama OPD: Satpol PP</b>   |  |   |   |                  |  |  |
| 1          | Mengedepankan upaya persuasif dalam Penegakkan perda dan meningkatkan Kompetensi personil/aparat         | Penertiban / Sosialisasi Perda kepada masyarakat | Bagian Hukum/OPD terkait lainnya  | Aparat Satpol PP / Masyarakat                                     | 1 Tahun Anggaran |  |  |
|            |  |  |   |   |                  |  |  |

|   |   |                                |              |                               |                  |  |  |
|---|---|--------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------|--|--|
| 2 | Melakukan pendataan lebih awal di wilayah yang banyak terdapat potensi gangguan tramtibum, serta lebih intensif melakukan penertiban secara berkala dengan membuat aplikasi pengaduan | Penertiban / Sosialisasi Perda | Bagian Hukum | Aparat Satpol PP / Masyarakat | 1 Tahun Anggaran |  |  |
|---|---|--------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------|--|--|

**RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN**

Nama Pemda : PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Tahun Penilaian : 2024

Tujuan Strategis : meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat Di Kota Denpasar  
 ::URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN  
 DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN

Urusan Pemerintahan MASYARAKAT

| No       | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan  | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
|----------|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|
| <i>a</i> | <i>b</i>   | <i>c</i>                                 | <i>d</i>                    | <i>e</i>                             | <i>f</i>                    | <i>g</i>   |
| 1        | Meningkatkan pengetahuan Aparat mengenai Deteksi dan Cegah Dini dalam upaya penanganan pelanggaran perda | Sosialisasi Perda kepada aparat          | Kepala OPD                  | TW IIITahun 2024                     | TW IIITahun 2024            |            |
| 2        | Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dengan instansi terkait                                     | Rapat / koordinasi                       | Kepala OPD                  | TW IV Tahun 2024                     | TW IV Tahun 2024            |            |

|   |   |  |               |                  |              |  |
|---|---|--|---------------|------------------|--------------|--|
|   |   |  |               |                  |              |  |
| 3 | Mengedepankan upaya persuasif dalam Penegakkan perda dan meningkatkan Kompetensi personil/aparat  | Penertiban / Sosialisasi Perda kepada masyarakat | Kepala Bidang | 1 Tahun Anggaran | Setiap tahun |  |
| 4 | Melakukan pendataan lebih awal di wilayah yang banyak terdapat potensi gangguan tramtibum, serta lebih intensif melakukan penertiban secara berkala | Penertiban / Sosialisasi Perda                   | Kepala Bidang | 1 Tahun Anggaran | Setiap tahun |  |
| 5 | melakukan pemeliharaan jaringan agar pembayaran gaji tetap lancar   | pemeliharaan secara berkala                      | Sekretaris    | 1 Tahun Anggaran | Setiap tahun |  |
| 6 | berkoordinasi dengan penyedia terkait harga barang dan pengiriman barang  | Koordinasi secara berkala                        | Sekretaris    | 1 Tahun Anggaran | Setiap tahun |  |

|   |   |                             |            |                  |              |  |
|---|---|-----------------------------|------------|------------------|--------------|--|
|   |   |                             |            |                  |              |  |
| 7 | melakukan pemeliharaan jaringan agar pembayaran gaji tetap lancar | pemeliharaan secara berkala | Sekretaris | 1 Tahun Anggaran | Setiap tahun |  |
| 8 | melakukan pengecekan rutin kondisi aset dan kendaraan             | pemeliharaan secara berkala | Sekretaris | 1 Tahun Anggaran | Setiap tahun |  |
|   |   |                             |            |                  |              |  |

Denpasar, 7 Januari 2025



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Denpasar

Anak Agung Nandih Bawa Nendra, SH., M.Si  
NIP. 6704181997031002